

Istilah yang Digunakan Gubernur Sumatera Barat dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19

Terms Used the Governor of West Sumatra in Overcoming Spread of Covid-19

Ria Febrina^{1,*} dan Sri Wahyuni²

^{1,2} Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

Kampus Unand Limau Manis, Kec. Pauh, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

^{1,*}Email: riafebrina@hum.unand.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1219-9072>

²Email: sriwahyuni@hum.unand.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8108-9091>

ARTICLE HISTORY

Received 2 November 2021

Accepted 19 February 2022

Published 1 May 2022

KEYWORDS

the term, Covid-19, politic language.

KATA KUNCI

istilah, Covid-19, bahasa politik.

ABSTRACT

This research aims to (1) describe, (2) explain the impact, and (3) recommend terms used by the Governor of West Sumatra in dealing with the spread of Covid-19. This research was conducted by listening and noting terms in words, phrases, and sentences used by the Governor of West Sumatra, then analysing the term and presenting research results in explanatory sentences. The results showed that (1) the terms used by the Governor of West Sumatra consisted of three forms, namely words, phrases, and abbreviations; (2) the use of the term has an impact on the social, psychological, economic, and cultural conditions of the Minangkabau community; and (3) determine the number of appropriate terms in dealing with Covid-19.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan, (2) menjelaskan dampak, dan (3) merekomendasikan istilah yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menyimak dan mencatat istilah berupa kata, frasa, dan kalimat yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat; lalu menganalisis istilah tersebut; serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) istilah yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat terdiri atas tiga bentuk, yaitu kata, frasa, dan abreviasi; (2) penggunaan istilah tersebut berdampak pada kondisi sosial, psikologi, ekonomi, dan budaya masyarakat Minangkabau; dan (3) direkomendasikan sejumlah istilah yang tepat dalam mengatasi Covid-19.

To cite this article:

Febrina, R., & Wahyuni, S. (2022). Istilah yang Digunakan Gubernur Sumatera Barat dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(2), 453—472. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i2.320>



A. Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memberlakukan Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) mulai Senin, 8 Juni 2020. Implementasi TNBPAC ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang “Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi”. Pemerintah pun menerbitkan protokol bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pada masa ini, bahasa merupakan hal paling penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Menurut Gubernur Sumatera Barat, sebagian besar masyarakat telah memahami protokol kesehatan Covid-19, namun belum melakukan secara disiplin. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut.

“Sudah mengetahui tapi belum diimplementasikan, kata kuncinya perilaku masyarakat kita semua harus disiplin, disiplin masker, jaga jarak dan lain sebagainya,” kata Irwan Prayitno (Kompas.com, 7 Juni 2020).

Gubernur Provinsi Sumatera Barat harus tegas dan bijaksana dalam membuat kebijakan melalui bahasa agar masyarakat Sumatera Barat dapat melakukan protokol kesehatan selama berkegiatan pada masa TNBPAC. Politik bahasa dapat menjadi karakter bahasa Gubernur Sumatera Barat dalam mengatur kehidupan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan selama TNBPAC. Bahasa direkayasa sebagai komoditas politik untuk mendukung terciptanya kehidupan yang wajar pada masa TNBPAC.

Selama ini imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat dinilai masih lemah dan cenderung tidak dipatuhi oleh masyarakat Sumatera Barat. Hal tersebut tampak pada hari pertama penerapan TNBPAC di Pasar Raya Padang. Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat tidak menunjukkan disiplin *menjaga jarak fisik* dengan masyarakat sekitar. Pada Gambar 1, tampak Gubernur Sumatera Barat berkunjung ke salah satu pusat pembelanjaan di Kota Padang pada hari pertama penerapan TNBPAC di Sumatera Barat, tetapi justru mengabaikan protokol tersebut.

Tidak hanya itu, bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat untuk mengatur masyarakat mematuhi protokol kesehatan lainnya, seperti protokol *memakai masker* juga diabaikan oleh masyarakat di Kota Padang. Hal ini tampak pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa Petugas Satpol PP menghukum seorang supir angkot dengan *squat jump* karena tidak menggunakan masker di Pasar Raya, Padang. Bahkan, gambar ini diambil ketika Kota Padang masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



Gambar 1. Gubernur Sumbar Mengunjungi Pasar Raya
(Sumber: Humas Pemprov Sumbar, 9 Juni 2020)



Gambar 2. Petugas Satpol PP Menghukum Warga
(Sumber: ANTARA/Iggoy el Fitra, 2020)

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol sejak PSBB hingga TNBPAC ini dipicu oleh banyaknya muncul istilah baru selama pandemi Covid-19 yang kemudian dinilai membingungkan masyarakat. Ada *corona virus disease*, ada *sosial distancing*, ada *physical distancing*, dan ada *lockdown*. Istilah tersebut diserap secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Padahal, dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang tercantum pada UU No. 50 Tahun 2015, sudah dijelaskan proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Proses penyerapan yang dimaksud mempertimbangkan kondisi bahasa dan kondisi budaya masyarakat di wilayah Indonesia.

Pada masa menyebarnya virus korona di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia seharusnya mengajak ahli bahasa Indonesia untuk memutuskan istilah yang dipakai dan membuat kebijakan bahasa untuk mensosialisasikan istilah tersebut agar dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik. Akan tetapi, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Para ahli bahasa Indonesia tidak diajak untuk memutuskan istilah yang dipakai dan juga tidak diajak mensosialisasikan istilah tersebut sesuai dengan karakter bahasa dan karakter budaya masyarakat. Dengan demikian, istilah yang muncul selama pandemi Covid-19 kemudian hanya menjadi istilah yang diketahui oleh masyarakat, tetapi tidak dipahami atau direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut terjadi pada salah satu situasi kebahasaan yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar berkenaan dengan respons terhadap protokol *physical distancing*. Dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di Nagari Rao-rao, Kabupaten Tanah Datar, frasa *physical distancing* tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka. Sepuluh orang masyarakat Tanah Datar yang berada di Rao-rao menyatakan bahwa mereka tidak memahami makna frasa *physical distancing*. Ketika disampaikan bahwa makna frasa tersebut ialah *jaga jarak fisik* dan mereka harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, mereka justru tidak menunjukkan respons apa-apa. Pada kondisi tersebut, mereka tetap duduk berdampingan dengan jarak kurang dari 50 cm (dalam satu warung), saling menepuk pundak, dan bersalaman ketika bertemu.

Di Sumatera Barat, poster yang memuat frasa *physical distancing* sangat banyak. Namun, karena masyarakat tidak memahami frasa tersebut, mereka mengabaikan protokol kesehatan berupa *jaga jarak fisik* dengan orang-orang sekitar. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa bahasa yang tepat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol *physical distancing* ialah *jaga jarak fisik*. Frasa *jaga jarak fisik* menggunakan bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan frasa *physical distancing* yang menggunakan bahasa Inggris dan tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, Gubernur Sumatera Barat perlu menggunakan bahasa sebagai komoditas politik untuk mencapai kehidupan yang stabil pada masa TNBPAC. Politik bahasa tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Republik Indonesia pada sejumlah keputusan Gubernur Sumatera Barat atau pada spanduk/poster/pamflet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Istilah-istilah yang direkayasa oleh Gubernur Sumatera Barat dengan menggunakan bahasa Indonesia dapat mengubah pandangan dan cara berpikir masyarakat yang menjadi subjek bahasa. Bahasa dalam pengertian sempit adalah alat komunikasi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Namun dalam pengertian lebih luas, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai wilayah, yakni wilayah politik, wilayah sosial, wilayah budaya, wilayah hukum, wilayah pendidikan, dan wilayah ekonomi.

Politik bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat penting dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat agar patuh pada berbagai kampanye pencegahan dan pengendalian Covid-19, seperti tercantum pada baliho, spanduk, iklan, dan kutipan hasil wawancara yang menghiasi media massa. Hal ini sejalan dengan pendapat Suprpto (2010) yang menyatakan bahwa melalui penggunaan bahasa terefleksi bagaimana kekuasaan digunakan. Dengan demikian, politik bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dapat mengendalikan kehidupan masyarakat Sumatera Barat pada masa TNBPAC.

Ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menjabarkan kesiapan sistem kesehatan, seperti kapasitas rumah sakit, tenaga medis, fasilitas isolasi,

laboratorium, dan alat pelindung diri (APD) yang mencukupi hingga Desember 2020, masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara disiplin. Tindakan disiplin tersebut dapat diwujudkan dengan tindakan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan politik bahasa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan. Melalui penelitian ini, akan dijelaskan bahasa yang sudah digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam memobilisasi gerakan masyarakat selama masa PSBB hingga TNBPAC. Bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat akan dianalisis dan dihubungkan dengan reaksi yang dilakukan masyarakat. Bahasa yang tidak sesuai dengan kondisi bahasa dan kondisi budaya masyarakat Sumatera Barat akan menjadi pertimbangan untuk kemudian direkayasa menjadi politik bahasa yang tepat agar dapat mengontrol kehidupan masyarakat pada masa TNBPAC.

Selain itu, juga akan direkomendasikan sejumlah kebijakan bahasa yang dapat digunakan Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat. Kebijakan bahasa didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Apalagi, penelitian mengenai istilah yang digunakan Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran covid-19 belum pernah dilakukan. Namun, penelitian mengenai politik bahasa masyarakat selama masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan oleh peneliti lain.

Syafar & Febrina (2020) menyatakan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia di media massa menggunakan tuturan yang menyangkal masuknya virus korona ke Indonesia. Tuturan tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial agar kehidupan berjalan secara normal dengan mengabaikan kemungkinan virus tersebut masuk ke Indonesia. Tuturan Pemerintah Republik Indonesia ini kemudian dipercayai oleh masyarakat Indonesia dan menyebabkan gagalnya komunikasi dalam mengatasi pencegahan Covid-19.

Weda (2009) menyatakan bahwa dalam kontrol sosial, perlu dilakukan rekayasa bahasa. Rekayasa bahasa bertujuan agar negarawan memiliki cita-cita politik (*politics is the queen of social science*) mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, rasa aman, harmoni, dan demokrasi. Anshori (2012) juga menjelaskan bahwa dalam bahasa politik, keberfungsian dan kebermaknaan itu tampak secara terang. Bahasa menyimpan kepentingan-kepentingan di luar sebagai simbol komunikasi manusia. Dengan demikian, dalam masa penyebaran Covid-19 ini, sangat perlu bagi Gubernur Sumatera Barat merekayasa bahasa yang tepat digunakan untuk menjalankan kontrol sosial.

Sementara itu, penelitian mengenai istilah selama Covid-19 juga sudah dilakukan oleh sejumlah ahli, seperti Ariesta et al. (2021), Wahyuni & Febrina (2021), Widiastutik et al. (2021), Budihastuti, (2020), Mizkat & Sari, (2020), dan Rahman (2020). Hasil penelitian para ahli tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memilih penggunaan kata dan frasa mengenai Covid-19 dari bahasa asing. Hal tersebut disebabkan oleh penilaian masyarakat yang menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi atau lebih unggul daripada bahasa Indonesia.

Meskipun demikian, juga terdapat sekelompok masyarakat yang berupaya menyerap bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, tetapi proses penyerapan istilah asing, baik secara adopsi, adaptasi, penerjemahan, ataupun kreasi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian para ahli tersebut. Dalam penelitian ini, tidak hanya diuraikan istilah yang digunakan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19, tetapi juga dijelaskan penggunaan istilah yang tepat yang sesuai dengan bahasa dan budaya Indonesia agar dapat dijadikan kebijakan oleh pemerintah, khususnya Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Selain itu, juga dilakukan analisis mengenai efektivitas penggunaan istilah yang berkaitan dengan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi kebijakan dalam merencanakan politik bahasa dalam setiap iklan layanan masyarakat nonkomersial yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai kata, frasa, dan kalimat yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 pada PSBB hingga TNBPAC. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat istilah yang berhubungan dengan Covid-19 di berbagai papan iklan nonkomersial milik Pemerintah Sumatera Barat. Selain itu, dilakukan juga penyimakan tanggapan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Gubernur Sumatera Barat pada berbagai iklan layanan tersebut tentang pencegahan Covid-19.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis data untuk membuktikan bahwa ada istilah-istilah dari bahasa Inggris pada bahasa iklan layanan masyarakat nonkomersial yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Analisis dilakukan dengan memilih kata, frasa, dan kalimat yang menjadi bahasa politik Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 pada masa TNBPAC. Dari istilah yang terkumpul tersebut, dilakukan klasifikasi data berdasarkan bentuk-bentuk yang diperoleh, seperti singkatan atau akronim. Untuk membantu memahami istilah tersebut, dijelaskan makna dari istilah tersebut berdasarkan pemahaman penulis setelah membaca berbagai referensi.

Adanya istilah dari bahasa Inggris merupakan penyebab bahasa tidak berfungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai kontrol sosial secara tepat, diperlukan bahasa yang direkayasa. Bahasa yang direkayasa tersebut berupa kata, frasa, dan kalimat. Rekayasa bahasa tersebut menjadi usulan kebijakan baru berkenaan dengan bahasa politik Gubernur Sumatera Barat dalam mencegah penyebaran Covid-19 pada masa TNBPAC. Pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis dilakukan berdasarkan metode yang dikemukakan oleh Sudaryanto (1993).

C. Pembahasan

Sejak masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC), Gubernur Sumatera Barat memiliki peran dalam penggunaan bahasa yang berkaitan dengan Covid-19. Gubernur Sumatera Barat melalui papan iklan nonkomersial memiliki peran dalam mensosialisasikan setiap istilah yang digunakan yang berkaitan dengan Covid-19. Setiap kosakata baru terkait Covid-19 disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat agar masyarakat memahami pemahaman yang sama.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Gubernur Sumatera Barat ialah kondisi masyarakat yang terkendali selama pandemi. Gubernur Sumatera Barat mengharapkan masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan ketika berkegiatan di luar rumah dan memaksimalkan bekerja dari rumah. Untuk mencapai hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan istilah dan abreviasi yang berhubungan dengan Covid-19 agar kondisi masyarakat terkendali sejak masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC).

Dari penuturan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, terdapat sejumlah kosakata, istilah, dan abreviasi yang baru dan wajib dikenali masyarakat. Namun, sejumlah bentuk tersebut ada yang dapat diterima masyarakat dengan baik, ada juga yang tidak dapat diterima masyarakat dengan baik.

1. Istilah yang Digunakan Gubernur Sumatera Barat

Dalam subbab ini, dibahas istilah dan abreviasi yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat. Bentuk yang digunakan masyarakat dikhususkan pada tiga bentuk, yaitu (1) kata, (2) (frasa), dan (3) abreviasi. Berikut penjelasan mengenai bentuk tersebut.

a. Istilah dalam Bentuk Kata

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia (2016), kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal (misalnya batu, rumah, datang) atau gabungan morfem (misalnya pejuang, Pancasila, mahakuasa). Istilah berbentuk kata yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.

b. Istilah dalam Bentuk Frasa

Kridalaksana (1985, hal. 115) menyatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata dengan kata yang bersifat nonpredikatif. Sementara itu, Ramlan (1985, hal. 115) menyatakan bahwa frasa ialah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Istilah yang berbentuk kata yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Istilah Covid-19 dalam Bentuk Kata

No.	Istilah	Makna
1	<i>Corona</i>	Penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
2	<i>Lockdown</i>	Tindakan darurat atau kondisi sementara waktu yang diperuntukkan bagi orang-orang untuk memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung.
3	<i>Suspect</i>	Seseorang yang dicurigai memiliki gejala dari virus corona, seperti hidung berair, pusing, batuk, demam, dan sakit tenggorokan. Namun, mereka masih dalam tahap menunggu hasil pemeriksaan dari dokter.
4	<i>Droplet</i>	Cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, atau berbicara.
5	<i>Tracing</i>	proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola orang-orang yang telah terpapar suatu penyakit untuk mencegah penularan lebih lanjut.

Tabel 2. Istilah Covid-19 dalam Bentuk Frasa

No.	Istilah	Makna
1	<i>Corona virus</i>	Penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
2	<i>Corona Virus Disease 2019</i>	Penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
3	<i>Suspect Corona</i>	Seseorang yang dicurigai memiliki gejala dari virus corona, seperti hidung berair, pusing, batuk, demam, dan sakit tenggorokan. Namun, mereka masih dalam tahap menunggu hasil pemeriksaan dari dokter.
4	<i>Social Distancing</i>	Tindakan-tindakan yang diambil pemimpin formal untuk menghentikan atau memperlambat kecepatan penyakit yang sangat mudah menular, seperti virus korona (Covid-19).
5	<i>Physical Distancing</i>	Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus korona dan mencegah Covid-19.
6	<i>Test Kit</i>	Alat pengujian virus corona (Covid-19).
7	<i>Rapid Test</i>	Metode pemeriksaan/tes secara cepat. Pemeriksaan ini menggunakan alat <i>catridge</i> untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena.
8	<i>Swab Test</i>	Proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola orang-orang yang telah terpapar suatu penyakit untuk mencegah penularan lebih lanjut.
9	<i>Hand Sanitizer</i>	Pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri
10	<i>Work From Home</i>	Sebuah konsep kerja dengan kondisi karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Bekerja dari rumah juga memberikan jam kerja yang fleksibel bagi karyawan.
11	<i>Herd Immunity</i>	Konsep yang digunakan untuk imunisasi agar seseorang dapat terlindung dari virus tertentu.
12	<i>Local Transmission</i>	Penularan virus korona di lokasi pasien.

c. Istilah dalam Bentuk Abreviasi

Menurut Kridalaksana (2008), abreviasi adalah suatu proses penanggalan satu atau beberapa bagian dari leksem atau kombinasi leksem yang membentuk bentuk baru yang berupa kata. Proses abreviasi ini bisa dengan mengurangi kata satu atau beberapa bagian leksem di bagian awal, tengah, maupun di akhir. Meskipun terjadi pengurangan ataupun penanggalan beberapa bagian leksem, namun arti dan maknanya tetap sama dan tidak berubah.

Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa macam abreviasi. Kridalaksana (2007) menyatakan ada beberapa jenis abreviasi, yaitu singkatan, akronim, kontraksi, penggalan, dan lambang huruf. Dalam bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat, ditemukan bentuk abreviasi yang terdiri atas singkatan dan akronim. Penjelasan mengenai bentuk abreviasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Singkatan

Singkatan merupakan hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf atau tidak dieja huruf demi huruf (Kridalaksana, 2007, hal. 162). Singkatan yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Singkatan

No.	Singkatan	Kepanjangan
1	OTG	Orang Tanpa Gejala
2	ODP	Orang Dalam Pemantauan
3	BLT	<i>Bantuan Langsung Tunai</i>
4	PDP	Pasien Dalam Pemantauan
5	PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
6	WFH	Work From Home
7	APD	Alat Pelindung Diri
8	3M	Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun
9	<i>TNBPAC</i>	Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19

Singkatan yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dibentuk melalui proses berikut.

(a) Pengekalan Huruf Pertama Tiap Komponen

Singkatan yang diperoleh melalui proses pengekalan huruf pertama tiap komponen dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengekalan Huruf Pertama Tiap Komponen

No.	Singkatan	Kepanjangan
1	APD	Alat Pelindung Diri
2	BLT	Bantuan Langsung Tunai
3	ODP	Orang Dalam Pemantauan
4	OTG	Orang Tanpa Gejala
5	PDP	Pasien Dalam Pemantauan
6	PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
7	WFH	<i>Work From Home</i>

(b) Pengekalan Huruf Pertama dengan Bilangan Berulang

Singkatan yang diperoleh melalui proses pengeklalan huruf pertama komponen awal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengekalan Huruf Pertama Tiap Komponen

No.	Singkatan	Kepanjangan
1	3M	Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun

(2) Akronim

Akronim merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata (Kridalaksana, 2007, hal. 162). Akronim yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Akronim

No.	Abreviasi	Kepanjangan
1	Covid-19	Corona Virus Disease-19
2	prokes	protokol kesehatan
3	ODP	Orang Dalam Pemantauan
4	protap	prosedur tetap
5	prokes 3M	protokol kesehatan Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun
6	protokol 3M	protokol Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun

Akronim yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dibentuk melalui proses berikut.

- (a) Pengeklalan suku pertama pada komponen pertama dan komponen kedua, serta pengeklalan huruf pertama pada komponen ketiga, serta penggabungan dengan penggalan angka.

prokes

protokol kesehatan

- (b) Pengekalan suku pertama pada komponen pertama dan komponen kedua, dan pengekalan huruf pertama pada komponen ketiga, serta penggabungan dengan penggalan angka.

Covid-19

Corona Virus Disease-2019

- (c) Pengekalan suku pertama pada komponen pertama dan suku kedua pada komponen kedua.

protap

prosedur tetap

(3) Gabungan Singkatan dan Akronim

Abreviasi yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat ada juga yang dibentuk dari gabungan singkatan dan akronim. Abreviasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

- (a) Pengekalan suku pertama pada komponen pertama dan komponen kedua, serta pengekalan huruf pertama pada komponen ketiga yang disertai dengan penggabungan pengekalan yang dilakukan pada huruf pertama komponen awal.

prokes 3M **protokol kesehatan Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun**

- (b) Penggabungan kata dasar dengan pengekalan yang dilakukan pada huruf pertama komponen awal

protokol 3M **protokol Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun**

2. Dampak Penggunaan Istilah

Penggunaan bahasa oleh Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) memiliki dampak terhadap kondisi sosial, psikologi, ekonomi, dan budaya masyarakat Minangkabau. Penjelasan mengenai dampak tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

a. Dampak Sosial

Semua istilah, singkatan, dan akronim yang muncul pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) merupakan bentuk baru. Hal ini

disebabkan oleh kemunculan Covid-19 yang mendadak menyerang seluruh dunia kondisi menyebabkan terjadi pandemi. Pandemi merupakan wabah penyakit global. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa terburuk dalam sejarah. Pandemi yang mirip flu ini dinyatakan oleh WHO pada 12 Maret 2020. Istilah pandemi menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia (2016) dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Covid-19 dimulai awalnya sebagai epidemi di China sebelum menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan bulan dan menjadi pandemi.

Pandemi Covid-19 sudah merenggut banyak nyawa, di beberapa daerah penyebarannya bahkan sulit dikendalikan. Namun, di Provinsi Sumatera Barat kasusnya cepat berkurang. Sumatera Barat menjadi wilayah yang juga terkena dampak pandemi Covid-19. Namun, Gubernur Sumatera Barat termasuk pemimpin daerah yang sigap dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Di Sumatera Barat ada dokter Andani Eka Putra yang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Bersama Gubernur Sumatera Barat, ia memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat. Ia menggunakan metode *pool test* pengujian sampel dalam jumlah banyak untuk memutus rantai Covid-19 dengan cepat.

Meskipun Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sudah melakukan hal tersebut, secara politik bahasa, penggunaan istilah, singkatan, dan akronim oleh pemangku kebijakan ini tidak memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat. Pertama, masyarakat bingung dengan istilah dan abreviasi mengenai *Covid-19* yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat. Meskipun Gubernur Sumatera Barat mengampanyekan melalui media massa, baik cetak, *online*, radio, maupun televisi, Gubernur Sumatera Barat tidak membuat panduan khusus yang mencantumkan istilah, singkatan, dan akronim beserta penjelasan atau menjelaskan secara lisan mengenai definisi istilah atau kepanjangan dari singkatan dan akronim tersebut. Masyarakat kemudian hanya memahami satu per satu istilah yang digunakan secara populer. Sementara itu, istilah yang tidak populer diabaikan oleh masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang diharapkan oleh Gubernur Sumatera Barat.

Kedua, sejumlah istilah, singkatan, atau akronim yang populer digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat memberikan pengaruh kepada masyarakat, khususnya penyakit dan bahaya *Covid-19* terhadap diri sendiri dan lingkungan. Sejumlah protokol kesehatan yang ditetapkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga, seperti 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan) dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, istilah, singkatan, atau akronim yang menggunakan bahasa Indonesia sangat sedikit sehingga masyarakat pun terlambat menanggapi risiko yang muncul selama pandemi Covid-19.

Ketiga, segala istilah, singkatan, dan akronim yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dan dilaksanakan oleh masyarakat kemudian mengubah tatanan sosial kehidupan masyarakat. Di sejumlah fasilitas umum, seperti rumah sakit, kantor pos, bank, dan kantor pemerintahan, aturan ini menyebabkan sejumlah masyarakat tidak berkerumun. Segala aktivitas pun kemudian beralih dari tatap muka menjadi *online*. Misalnya, pengurusan surat-menyurat yang masih dalam proses pengajuan administrasi cenderung beralih melalui aplikasi. Sementara itu, hanya pengurusan dokumen yang mewajibkan tatap muka antara pegawai dan masyarakat yang dilaksanakan di kantor, seperti akad kredit, pengiriman paket barang, dan pembayaran cicilan khusus.

Dengan pelaksanaan aturan tersebut secara serentak se-Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, sejumlah masyarakat pun terdorong untuk patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Meskipun ada sejumlah masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, namun penggunaan bahasa oleh Gubernur Sumatera Barat dapat dipahami dengan baik. Melalui singkatan 3M pun, masyarakat sudah terbiasa mengenakan masker ke mana-mana, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

b. Dampak Psikologis

Dari respons masyarakat terhadap bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat, diketahui berdampak baik dan juga berdampak buruk bagi psikologis masyarakat. Secara psikologis, masyarakat dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan setiap mendengar istilah tersebut. Hal ini disebabkan oleh aktivitas yang berhenti secara mendadak di seluruh wilayah. Masyarakat kebingungan untuk menentukan pilihan, seperti bertahan di rumah saja tanpa ekonomi yang stabil atau beraktivitas di luar rumah dengan risiko penyakit yang berat.

Minimnya penjelasan Gubernur Sumatera Barat terkait istilah yang digunakan menyebabkan masyarakat terbatas dalam memahami sejumlah istilah, khususnya istilah berbahasa Inggris. Namun, sejumlah tokoh masyarakat mendampingi Gubernur Sumatera Barat untuk mensosialisasikan istilah yang ada. Pihak-pihak, seperti perusahaan, bank, *leasing*, kampus, dan lembaga pemerintahan juga mencari padanan istilah berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Secara perlahan, sejumlah istilah tersebut kemudian diserap oleh masyarakat.

Istilah yang berbahasa Indonesia itu pun secara berkelanjutan juga digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat. Dengan demikian, banyak pihak yang membantu Gubernur Sumatera Barat secara politik bahasa mensosialisasikan sejumlah aturan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC). Dengan demikian, masyarakat secara perlahan dapat mengendalikan diri dan mematuhi protokol kesehatan setelah mengetahui istilah atau abreviasi bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap istilah dan abreviasi yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat menjadi dampak baik bagi psikologis masyarakat. Masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan nyaman selama masa pandemi *Covid-19*, khususnya pada masa Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC).

c. Dampak Ekonomi

Dalam penerapan istilah yang mengontrol perilaku masyarakat selama masa pandemi *Covid-19*, khususnya pada masa Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC), terdapat perubahan perilaku membaik di bidang ekonomi. Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas masyarakat terhambat dan hampir semua pelaku ekonomi merasakan dampak negatif. Ekonomi mereka menurun dan bahkan mencapai kondisi kritis.

Bidang transportasi misalnya, yang bergerak di sektor jasa pengangkutan orang mengalami dampak yang buruk. Begitu juga dengan jasa lain, seperti makanan dan pelayanan. Masyarakat tidak menerima pelanggan dengan jumlah yang diharapkan sehingga sektor ekonomi pun memburuk. Namun, kondisi ini hanya berlangsung beberapa bulan. Jasa transportasi *online*, kemudian membantu semua sektor ekonomi untuk beroperasi seperti biasa. Masyarakat dapat berbelanja kebutuhan harian melalui *Gojek*, *Grab*, dan *Maxim*.

Transaksi keuangan yang selama ini menggunakan sistem tunai pun berubah menjadi *e-money* atau tanpa tunai. Interaksi masyarakat dengan bersentuhan tangan semakin berkurang dan pengendalian kondisi masyarakat terkait penularan Covid-19 pun semakin rendah. Apalagi, di semua tempat sudah disediakan fasilitas yang mendukung, seperti *hand sanitizer* dan tempat mencuci tangan. Dengan demikian, selama masa Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC), aktivitas ekonomi masyarakat pun berada dalam kondisi yang membaik.

d. Dampak Budaya

Penggunaan bahasa oleh Gubernur Sumatera Barat melalui tulisan di berbagai media juga berdampak pada perubahan aktivitas kebudayaan oleh masyarakat Minangkabau. Selama ini masyarakat Minangkabau terbiasa menyampaikan kabar buruk melalui falsafah *kaba buruak bahambauan*. Jika ada anggota masyarakat yang menderita karena penyakit, kekurangan pangan, atau kecelakaan, mereka akan mengabari secara lisan. Namun, dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya melalui penggunaan bahasa Gubernur Sumatera Barat bahwa setiap orang harus berada di rumah dan harus menjaga jarak, kebiasaan gotong-royong membantu masyarakat pun berubah. Media penyampaian *kaba buruak bahambauan* berubah dari lisan ke tulisan.

Masyarakat Sumatera Barat merespons dengan baik anjuran Gubernur Sumatera Barat untuk berada di rumah. Namun, aktivitas kebudayaan mereka, seperti gotong-royong membantu sesama tetap dilaksanakan. Nilai gotong-royong antara masyarakat tidak berubah meskipun telah terjadi pandemi Covid-

19. Hal tersebut diwujudkan oleh masyarakat Minangkabau dalam bentuk penggunaan bahasa melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, Whatsapps, dan Twitter.

Dari analisis yang dilakukan terhadap aktivitas budaya yang dilakukan masyarakat Sumatera Barat, ditemukan sejumlah tuturan yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dalam menyampaikan *kaba buruak bahambauan*. Hal ini terwujud dari pilihan kata pada Tabel 7.

Tabel 7. Istilah Masyarakat Sumatera Barat dalam Menyampaikan Kabar Buruk

No.	Data Bahasa
1	Donasi Pangan
2	Memberi untuk Nagari Sumatera Barat
3	Sembako untuk Dhuafa di Sumatera Barat
4	<i>Terdampak Kasus Korona</i>
5	<i>Sumbar Peduli</i>
6	<i>Program Sedekah Pangan</i>
7	<i>Program Peduli Nagari Sumbar</i>
8	<i>Sebungkus Nasi Seteguk Air</i>
9	<i>Gerakan 1000 Sembako</i>
10	<i>Donasi sampah</i>
11	<i>Sedikit Sampah Bermanfaat untuk Kehidupan Mereka</i>
12	<i>Berbagi di Tengah Pandemi</i>
13	<i>Peduli Sahabat Online Roda Dua</i>
14	<i>Ayo, ambil saham kebaikan! Saatnya bantu sesama!</i>

Dari pilihan kata yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat, dapat dilihat bahwa makna yang ingin disampaikan tidak hanya untuk mengujarkan sesuatu, tetapi membuat orang lain percaya terhadap aksi yang dilakukan dan mau bekerja sama berbuat sesuatu untuk membantu masyarakat yang kesulitan. Pilihan kata tersebut berdampak pada pelestarian nilai-nilai luhur dalam masyarakat, yaitu nilai gotong-royong dalam falsafah *kaba buruak bahambauan* meskipun mengalami transformasi dari lisan ke tulisan.

Dengan media baru yang bertransformasi dari lisan ke tulisan, tidak menyebabkan masyarakat berhenti melakukan aksi sosial. Aksi sosial diwujudkan dalam bentuk penggunaan bahasa yang khas dalam menggalang bantuan, baik berupa uang, makanan, pakaian, dan alat-alat medis. Hal ini terwujud melalui penggunaan sejumlah bentuk-bentuk lingual yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat dalam menggalang bantuan dana secara gotong-royong berasal dari bahasa Indonesia, seperti *donasi*, *aksi*, *sedekah*, *bantuan*, *berbagi*, *peduli*, dan *galang*, serta berasal dari bahasa Minangkabau, seperti *badoncek* dan *basidoncek*.

Bentuk-bentuk lingual yang digunakan masyarakat merupakan bentuk-bentuk yang mengalami perubahan makna secara meluas. Penggunaan bentuk-bentuk tersebut berdampak pada pelestarian nilai-nilai luhur dalam masyarakat, yaitu nilai gotong-royong atau *manunggal sakato*. Masyarakat tidak merasakan dampak negatif selama pandemi Covid-19, tetapi sebaliknya merasakan dampak positif melalui sikap memberi dan peduli terhadap sesama. Hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat Minangkabau yang tidak pernah menunjukkan kehidupan yang susah kepada orang lain.

Tidak hanya berkaitan dengan sikap kegotongroyongan, masyarakat Sumatera Barat juga tidak berhenti berkarya dan melakukan aktivitas kebudayaan. Di Taman Budaya Sumatera Barat, sejumlah seniman dan pelaku kebudayaan tetap menggelar dan mempertunjukkan karya teater kepada masyarakat. Namun, dengan adanya aturan pembatasan kerumunan, para seniman menyiapkan dua model pertunjukkan, yakni pertunjukan langsung dan pertunjukan daring. Jumlah penonton pada pertunjukan langsung dibatasi sesuai aturan Gubernur Sumatera Barat. Jumlah penonton pada pertunjukan daring tanpa batas. Bahkan, penonton tidak hanya berasal dari wilayah Sumatera Barat, tetapi juga berasal dari wilayah lain di Sumatera Barat yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, penonton pun ada yang berasal dari negara lain, seperti Malaysia.

Hal ini menunjukkan bahwa tatanan budaya selama masa pandemi *Covid-19*, khususnya pada masa Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Covid-19* (TNBPAC) memberikan perubahan membaik kepada masyarakat. Dengan demikian, kondisi yang dialami oleh masyarakat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Covid-19* (TNBPAC) tidak menyebabkan kekacauan. Melalui penggunaan bahasa yang tepat, baik secara lisan maupun tulisan dapat menyebabkan masyarakat membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini tidak merusak tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, tetapi mendukung setiap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada.

3. Rekomendasi Kebijakan Bahasa

Dengan menganalisis penggunaan bahasa yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Covid-19* (TNBPAC) yang masih belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, direkomendasikan sejumlah bentuk. Bentuk bahasa yang direkomendasikan ini sudah melalui proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Kridalaksana (2008) dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia (2016).

Tabel 8 berisi data yang ada dan usulan kebijakan yang dapat diberikan kepada Gubernur Sumatera Barat agar digunakan untuk masa yang akan datang, khususnya dalam jumpa pers, surat-menyurat, poster, spanduk, serta berbagai iklan layanan masyarakat komersial dan iklan layanan masyarakat nonkomersial.

Rekomendasi kebijakan bahasa Indonesia dapat digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat dan juga wartawan dalam meningkatkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah. Jika upaya ini dilakukan pemerintah dan masyarakat terkait secara kontinu, sikap bahasa masyarakat akan berkembang ke arah yang lebih baik. Masyarakat akan menyadari kaidah dan menghargai bahasa Indonesia.

Tabel 8. Rekomendasi Bahasa

No.	Istilah	Rekomendasi Bahasa
1	<i>Corona</i>	korona
2	<i>Corona virus</i>	virus korona
3	<i>Corona Virus Disease 2019</i>	penyakit virus korona-19 (<i>Covid-19</i>)
4	<i>Covid-19 (Corona Virus Disease-2019)</i>	<i>Covid-19 (Corona Virus Disease-2019)</i>
5	<i>Droplet</i>	tetes
6	<i>Hand Sanitizer</i>	pembersih tangan
7	<i>Herd Immunity</i>	kekebalan kolektif
8	<i>Local Transmission</i>	penularan lokal
9	<i>Lockdown</i>	karantina wilayah
10	<i>New Normal</i>	AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
11	<i>Physical Distancing</i>	jaga jarak fisik
12	<i>Rapid Test</i>	tes cepat
13	<i>Social Distancing</i>	jaga jarak sosial
14	<i>Suspect</i>	penderita
15	<i>Suspect Corona</i>	penderita korona
16	<i>Swab Test</i>	tes usap
17	<i>Test Kit</i>	alat uji
18	<i>Tracing</i>	pelacakan
19	WFH (Work From Home)	KDR (Kerja Dari Rumah)
20	<i>Work From Home</i>	bekerja dari rumah

D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) istilah dan abreviasi yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat terdiri atas tiga bentuk, yaitu (1) kata, (2) (frasa), dan (3) abreviasi. Penggunaan istilah oleh Gubernur Sumatera Barat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) memiliki dampak terhadap kondisi sosial, psikologi, ekonomi, dan budaya masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, (2) dengan menganalisis penggunaan istilah yang digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat yang masih belum sesuai, direkomendasikan sejumlah bentuk istilah yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu *korona*, *virus korona*, *penyakit virus korona-19 (Covid-19)*, *Covid-19 (Corona Virus Disease-2019)*, *tetes*, *pembersih tangan*, *kekebalan kolektif*, *penularan lokal*, *karantina wilayah*, *AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)*, *jaga jarak fisik*, *tes cepat*, *jaga jarak sosial*, *penderita*, *penderita korona*, *tes usap*, *alat uji*, *pelacakan*, *KDR (Kerja Dari Rumah)*, dan *bekerja dari rumah*.

E. Ucapan Terima Kasih

Hasil penelitian ini merupakan luaran dari riset penelitian dosen pemula yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Andalas pada tahun 2020. Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Andalas atas bantuan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anshori, D. S. (2012). Bahasa Politik: Objek Studi Kritis Penelitian Bahasa. *Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1–9. http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/197204031999031-DADANG/Artikel_Bahasa_politik.pdf
- Ariesta, W., Qoyyimah, A. L. N., & Markhamah, M. (2021). Pergeseran Bahasa Baku: Ragam Bahasa Elitis dalam Akun Instagram Humor Recehku. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(3), 259–274. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.159>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia.
- Budiastuti, E. (2020). Istilah Kesehatan Yang Berkenaan Dengan Covid-19 Yang Dipilih Generasi Milenial. *Epigram*, 17(2), 111–118. <https://doi.org/10.32722/epi.v17i2.3457>
- Fitra, Iggo E. (2020). *Langgar PSBB, Sopir Angkot di Padang Bersihkan Toilet Umum* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200519163723-20-504982/langgar-psbb-sopir-angkot-di-padang-bersihkan-toilet-umum>.
- Kridalaksana, H. (1985). *Tata Bahasa Deskripsi Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kridalaksana, H. (2007). *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik Umum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, Pub. L. No. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1 (2020). <https://www.kemkes.go.id/article/view/20053000004/pencegahan-covid-19-di-tempat-kerja-pengelola-harus-siapkan-fasilitas-yang-aman-dan-sehat.html>
- Mizkat, E., & Sari, R. M. (2020). Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 Pada Praktik Penyiaran Mahasiswa Berbasis Media Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*, 94–100. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1510>
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia.
- Putra, P. (2020). Gubernur: Sumatera Barat Terapkan New Normal, Kecuali Padang dan Mentawai. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/07/17384871/gubernur-sumatera-barat-terapkan-new-normal-kecuali-padang-dan-mentawai?page=all>.
- Rahman, A. (2020). Keberterimaan Istilah-Istilah di Masa Pandemi Covid-19. *Bidar*, 10(2), 68–82.

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/bidar/article/view/3187>

- Ramlan, M. (1985). *Tata Bahasa Indonesia Penggolongan Kata*. Andi Offset.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Suprpto, T. (2010). *Politik Redaksi Berita*. Pustaka Kaiswara.
- Syafar, D. N., & Febrina, R. (2020). Tuturan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Media Massa: Suatu Pendekatan Pragmatik. *Prosiding MLI*.
- Wahyuni, S., & Febrina, R. (2021). The Formation of the Term in the Indonesian Language Related to Covid-19 and Its Impact on the Communities Socio-Psychological Aspects. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 556(Access 2020), 394–399. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.115>
- Weda, S. (2009). *Politik dan Rekayasa Bahasa*. Media Qita Foundation.
- Widiastutik, S., Putra, I. P. R. L., & Pratiwi, A. A. (2021). Elaborasi Penggunaan Istilah Covid-19 Terhadap Pemahaman Masyarakat. *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 21(2), 87–91. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i2.10936>

